

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sumber daya pada sektor perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan memiliki potensi dijadikan sebagai penggerak utama (prime mover) ekonomi nasional. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa pertama, Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas. Kedua, Industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Ketiga, Industri perikanan berbasis sumber daya nasional atau dikenal dengan *istilah national resources based industries*, dan keempat Indonesia memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya yang ada (Daryanto (2007)).

Dalam kaitannya dengan itu maka setiap Pemerintah Daerah berupaya sendiri menggali potensi di daerah masing-masing yang dipunyai untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Seperti halnya Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari beberapa daerah kecamatan dengan berbagai potensi, yaitu antara lain potensi perikanan baik di darat maupun laut. Sesuai pendapat Solihin (2005) bahwa, sektor perikanan dan kelautan diharapkan menjadi sektor andalan guna mendukung pembangunan perekonomian bangsa. Peluang untuk membangun bangsa melalui pendayagunaan sektor perikanan dan kelautan sangat besar karena kebutuhan terhadap bahan pangan baik nasional (domestik) maupun internasional (global) akan selalu meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Dan Menurut Parwinia (2001) menyatakan bahwa subsektor perikanan merupakan salah satu sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia mengingat prospek pasar baik dalam negeri maupun internasional cukup cerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber- sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2002), "pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah".

Menurut Barata (2004), yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah : Pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa setiap pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi guna terciptanya kesejahteraan masyarakat luas. Demi mencapai hal tersebut, maka daerah diberi hak dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri agar mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Bab ke- VIII tentang keuangan daerah, diketahui bahwa salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah pendapatan asli daerah (PAD), dimana dalam PAD terdapat pajak daerah dan retribusi daerah.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi yang lebih luas kepada provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing-masing, termasuk mengelola sumberdaya kelautan di wilayahnya. Dalam pasal 3 UU No. 22 tahun 1999 dinyatakan bahwa wilayah daerah provinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Selain itu pada pasal 10 disebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota dalam mengelola laut adalah sejauh sepertiga dari batas laut

daerah provinsi, sehingga dengan dasar Undang-undang tersebut, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan sumberdaya yang ada seoptimal mungkin. Setelah otonomi daerah, masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor mana yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki 2 keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang (Tarigan, 2005).

Kabupaten Bangkalan memiliki potensi perikanan baik laut maupun darat yang sangatlah besar karena memiliki wilayah laut cukup luas. Selain itu didukung oleh sentra-sentra penangkapan ikan (nelayan) dan perikanan darat yang tersebar di sepanjang garis pantai Kabupaten Bangkalan. Produk perikanan laut andalan Kabupaten Bangkalan adalah Udang, Cumi, Tongkol Ikan Layang, Kakap, Rajugan dan Pari. Sedangkan perikanan darat yang dihasilkan adalah Ikan Mas, Mujaer, Bandeng, Tawes dan Udang Windu. Keseluruhan hasil perikanan laut dan darat tersebut merupakan peluang yang baik bagi pendapatan daerah. Besar atau kecilnya kontribusi yang diberikan oleh sektor perikanan terhadap daerah akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya Pendapatan Asli Daerah sehingga peneliti mengangkat judul penelitian ini "Analisis Potensi Sektor Perikanan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan, Madura".

## **1.2 Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana potensi perikanan di Kabupaten Bangkalan
2. Bagaimana hubungan sektor perikanan dengan Pendapatan Asli Daerah Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan
3. Bagaimana kontribusi yang diberikan sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.
4. Bagaimana strategi pengembangan sektor perikanan terhadap peningkatan kontribusi PAD Kabupaten Bangkalan.

## **1.3 Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi potensi perikanan yang dimiliki di Kabupaten Bangkalan.
2. Menganalisis hubungan sektor perikanan dengan Pendapatan Asli Daerah Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.
3. Menganalisis kontribusi yang diberikan sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan.
4. Menyusun strategi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan kontribusi PAD Kabupaten Bangkalan.

#### **1.4 Kegunaan**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi:

1. Masyarakat

Sebagai bahan untuk menambah informasi yang dapat digunakan untuk menambah wawasan tentang potensi perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan.

2. Lembaga akademik dan non-akademik

Sebagai sarana informasi ilmiah untuk diadakan penelitian lebih lanjut dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan analisis potensi sektor perikanan dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah.

3. Pemerintah

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk dapat menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan sektor perikanan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan daerah melalui pengembangan potensi sektor perikanan di Kabupaten Bangkalan.